

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN ANAK NAKAL DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun Oleh:

SITI SUPRIHATIN

06401241044

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2010

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan
Anak Nakal di Yogyakarta**

Telah disetujui oleh pembimbing Skripsi untuk dipertahankan di Depan Dewan
Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Oktober 2010

Dosen Pembimbing

Sri Hartini, M.Hum

NIP. 19580116 198503 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Oktober 2010 dan dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Sri Hartini, M. Hum.	Ketua Penguji
Iffah Nurhayati, M.Hum.	Sekretaris Penguji
Anang Priyanto, M. Hum.	Penguji Utama

Yogyakarta, November 2010

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Sardiman AM, M.Pd.
NIP. 1951023 198003 1 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Suprihatin

NIM : 06401241044

Program Study : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ekonomi

Judul Skripsi : Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam
Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 18 Oktober 2010

Siti Suprihatin
Nim. 06401241044

MOTTO

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan

(QS: Alam Nasyrah: 6)

JANGAN MELIHAT MASA LALU DENGAN PENYESALAN, JANGAN PULA
MELIHAT MASA DEPAN DENGAN KETAKUTAN, TETAPI LIHATLAH
SEKITARMU DENGAN PENUH KESADARAN

(JAMES THURBER)

Mereka akan mendapat hak sesuai dengan yang mereka usahakan, Allah
Maha Cermat dan Cepat dalam menghitung amal hamba-Nya

(QS: Al Baqoroh: 202)

Hidup bukanlah perjalanan tanpa makna, berbuatlah yang terbaik untuk
hidupmu atau hidupmu akan sia-sia. Hidup adalah perjuangan, tanpa
perjuangan janganlah kamu berharap akan bisa hidup

(Penulis)

PERSEMBAHAN

SERAYA MENUNDUKKAN KEPALA DAN MENENGADAHKAN KEDUA TANGAN SEIRING DENGAN UCAPAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MENUNTUN HAMBANYA UNTUK MENYELESAIKAN SALAH SATU TUGAS DALAM HIDUP.

Karya sederhana ini saya dedikasikan kepada:

- Alm. Ayahanda
- Ibunda tercinta yang tiada henti berdoa untuk anak-anaknya
- Ikhsan Prasetya Jati dan Wahyu Widayati yang selalu memberi motivasi hidup
- Almamater-ku
- Mahasiswa angkatan *06

ABSTRAK

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN ANAK NAKAL DI YOGYAKARTA

Oleh:

Siti Suprihatin

06401241044

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta di Jalan Trikora No. 1 Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengambilan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data dari hasil wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) unitisasi dan kategorisasi, 3) display data, 4) pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAPAS Kelas 1 Yogyakarta mempunyai peranan dalam pembimbingan anak nakal melalui tiga tahap pembimbingan yaitu: 1) tahap awal, 2) tahap lanjutan, 3) tahap akhir. Hambatan-hambatan yang ditemui BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam pembimbingan anak nakal berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Hambatan dari faktor intern yaitu: 1) Keterbatasan sarana dan prasarana, 2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM), 3) Terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Yogyakarta. Hambatan yang berasal dari faktor ekstern yaitu: 1) kondisi klien anak, 3) keadaan ekonomi orang tua klien anak, 3) keadaan masyarakat di sekitar klien anak. Upaya yang dilakukan oleh BAPAS Kelas 1 Yogyakarta untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor intern yaitu: 1) Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada, 2) meningkatkan kualitas SDM dari Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta. Upaya yang dilakukan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor ekstern yaitu: 1) Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada, 2) melakukan pendekatan terhadap masyarakat.

KATA PENGANTAR

Tiada kata terindah yang pantas diucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta” dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berkenan memberi izin penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
2. Sardiman AM, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta beserta staf yang telah membantu memberikan rekomendasi penelitian.
3. Bapak Anang Priyanto, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, yang telah membantu dalam perizinan penelitian, sekaligus sebagai narasumber dan penguji utama yang telah bersedia memberi masukan dan saran kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Sri Hartini, M. Hum selaku Dosen pembimbing sekaligus ketua penguji yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan dan motivasi.
5. Ibu Iffah Nurhayati, M.Hum selaku sekretaris penguji yang telah bersedia memberikan masukan dan saran kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen jurusan PKn dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan suri tauladan kepada penulis.
7. Gubernur Propinsi Daerah Isimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
8. Kepala BAPAS Kelas 1 Yogyakarta beserta staf-stafnya yang telah bersedia memberikan data untuk penelitian.
9. Ikhsan Prasetya Jati dan Wahyu Widayati yang selalu memberikan dukungan dan semangat, mas Kukum dan mas Yudhi (Rental Icon) yang senantiasa membantu editing tugas akhir skripsi ini.
10. Rekan-rekan PKn dan Hukum angkatan 06 yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan, dukungan, bimbingan, kebersamaan dan pengorbanannya semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan

penulis terima dengan senang hati guna perbaikan selanjutnya. Akhir kata semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pembimbingan anak nakal yang lebih optimal.

Yogyakarta, 18 Oktober 2010
Penyusun,

Siti Suprihatin

DAFTAR ISI

	halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Pengertian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Tinjauan Tentang Anak Nakal	13
1. Pengertian Anak	13
2. Pengertian Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil	15

3. Batasan Usia Anak Nakal	16
B. Tinjauan Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	16
1. Sekilas Tentang Lahirnya BAPAS	16
2. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang BAPAS.....	17
3. Klien Pemasyarakatan.....	21
4. Klasifikasi dan Bagan Organisasi BAPAS	22
C. Tinjauan Tentang Pembimbingan Anak Nakal Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tempat dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
C. Penentuan Subjek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Tentang BAPAS Kelas I Yogyakarta	39
1. Sejarah Singkat BAPAS Kelas I Yogyakarta	39
2. Lokasi dan Wilayah Hukum BAPAS Kelas I Yogyakarta	41
3. Struktur Organisasi BAPAS Kelas I Yogyakarta	42
B. Peranan BAPAS Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta..	48
C. Hambatan-Hambatan yang Ditemui Oleh BAPAS	

Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta	62
D. Upaya yang dilakukan Oleh BAPAS Dalam Pembimbingan	
Anak Nakal di Yogyakarta	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Personil Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Yogyakarta	47
2. Tingkat Pendidikan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta	64

DAFTAR BAGAN

1. Susunan Organisasi BAPAS Kelas I	25
2. Susunan Organisasi BAPAS Kelas II	25
3. Bagan Struktur Organisasi BAPAS Kelas I Yogyakarta	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pengaruh kemajuan iptek dan kemajuan budaya, bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam konsumerisme dan asosial yang semakin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang disibukkan dengan urusan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, maupun gengsi.

Dalam kondisi yang demikian, anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan dari orang tua. Secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman, dan perhatian kepada anak seharusnya diawali sedini mungkin dalam keluarga, karena keseluruhan aspek psikologis tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental bagi anak (Sudarsono, 2004: 8). Pada usia anak-anak dan remaja, keadaan kejiwaan mereka masih sangatlah labil sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh sesuatu dari luar diri mereka, dimana tidak semuanya membawa akibat baik. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering

bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan:

“bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah letak pentingnya suatu pembinaan maupun bimbingan yang seharusnya dilakukan terhadap individu yang melakukan pelanggaran serta penyimpangan terhadap norma-norma hukum di dalam masyarakat, terutama sekali terhadap pelaku perbuatan pidana yang masih berusia muda.

Di Indonesia masalah kenakalan anak dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Media surat kabar dan televisi memuat berita antara lain: pencabulan terhadap seorang gadis di Sleman yang masih berusia 14 tahun, pelaku adalah GA yang berusia 17 tahun (Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 2010). Pembunuhan siswi SMA N 1 Lendah Wates Kulon Progo, korban adalah Fatma berusia 16 tahun, sedangkan tersangka berinisial Ags yang berumur 17 tahun (Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 2010). Kemudian juga, kasus penjambretan pada hari jum'at tanggal 2 April 2010, terjadi di dusun Kemusuk Argomulyo Sedayu Bantul, dimana salah satu pelaku adalah anak yang masih berusia 16 tahun (Kedaulatan Rakyat tanggal 5 April 2010). Sementara itu siswa SMP Pengok Timbulharjo Sewon, berinisial GR (15

tahun) ditangkap karena kepergok membobol pintu dapur warga, ia berniat ingin menggasak tabung dan kompor gas milik Yusmani yang berusia 52 tahun (Kedaulatan Rakyat, 30 April 2010).

Kondisi maraknya kenakalan anak memberi dorongan kuat bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk lebih memperhatikan masalah kenakalan anak, seperti orang tua dan kelompok edukatif di lingkungan sekolah yang berperan sebagai pendidik, masyarakat sebagai kesatuan yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan anak, para penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Polisi, Jaksa, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, demikian juga pihak pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum, yakni Balai Pemasyarakatan sebagai pendamping instansitas bagi anak nakal.

Menurut Zakiah Darajat yang dikutip oleh Nurjaman, mengatakan:

“Terhadap anak remaja yang telah melakukan kenakalan memang perlu diadakan pengusutan, penahanan, penuntutan demi hukum guna menjamin rasa aman pada masyarakat dan anak itu sendiri. Sebagaimana tersebut perlu disadari bahwa anak-anak remaja yang nakal tersebut perlu diperbaiki agar bisa diterima kembali dalam masyarakat yang terhormat. Kiranya perlu dipelajari dan diteliti segala sesuatu latar belakang kehidupan mereka dan jika mungkin penelitian secara pribadi. Hal tersebut diperlukan untuk memahami apa yang menyebabkan mereka nakal, mungkin ada faktor dari dalam sendiri, mungkin pula pengaruh lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat” (Nurjaman, 2003: 4).

Perlulah diingat, bahwasannya penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota

masyarakat yang lebih baik. Konsepsi fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Bambang Waluyo, 2004: 3).

Mengingat sangat pentingnya peranan dan fungsi anak sebagai bagian dari generasi muda dalam kelangsungan hidup bangsa, maka adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak memerlukan adanya penanganan secara khusus dalam proses pemidanaan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah berusaha untuk melindungi hak-hak anak walaupun mereka melakukan atau terlibat tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan, walaupun dipenjarakan atau ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja, jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) tahun 1990 Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Keberadaan Undang-Undang tersebut seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun

harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak-Hak Anak (*Convention on the Raight of the Child*). Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang meliputi:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, peranan BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
2. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dirumuskan bahwa, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 9). Lebih diperjelas dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :

1. Terpidana Bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
6. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Ketentuan mengenai klien pemasyarakatan, dalam Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa setiap klien pemasyarakatan wajib didaftar, dimana pendaftaran tersebut diperjelas dalam Pasal 40 yang meliputi:

1. Pencatatan:
 - a. Putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri
 - b. Jati diri

2. Pembuatan pas foto
3. Pembuatan sidik jari
4. Pembuatan berita acara serah terima klien

Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Rumusan pasal-pasal tersebut di atas, tentu saja belum memberikan kejelasan mengenai peranan BAPAS. Penjabaran mengenai peranan BAPAS dapat disimak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian di dalam tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Salah satu dari klien tersebut adalah klien anak, sehingga BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak mempunyai peranan dalam pembimbingan anak nakal.

Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berperan pada saat proses integrasi sosial dilaksanakan, yaitu bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dapat menuntun, menghantar dan mengarahkan anak nakal untuk kembali kepada lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat. Di samping itu dengan adanya pembimbingan terhadap anak nakal diharapkan agar anak tersebut menjadi insaf dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada seorang klien anak yang sedang dibimbing oleh BAPAS Kelas 1 Yogyakarta namun ia melakukan tindak pidana lagi (data dokumentasi BAPAS Kelas 1 Yogyakarta tahun 2010). Dari contoh kenyataan seperti ini dapat disinyalir adanya kendala dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kiranya dapat dikemukakan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah bacaan dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum acara pidana, khususnya pada lembaga pemasyarakatan, dan pembimbingan anak nakal oleh BAPAS di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Lembaga Pemasyarakatan khususnya kepada instansi Balai

Pemasyarakatan untuk lebih meningkatkan peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

E. Batasan Pengertian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat mengenai pengertian yang terkandung dalam judul “Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta”, maka diberikan pengertian sebagai berikut:

1. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Tim, 1990: 667). Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh BAPAS.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2).
3. Anak Nakal adalah :
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2).

Jadi yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh BAPAS dalam pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani kepada anak yang melakukan tindak pidana dan juga terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Anak Nakal

1. Pengertian Anak

Pengertian mengenai anak belum ada keseragaman, sehingga tidaklah mengherankan dalam beberapa peraturan perundang-undangan ditemukan pengertian anak yang berbeda-beda. Adapun pengertian anak antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus anak melainkan orang yang sudah dewasa.

- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini tidak langsung mengatur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang ditentukan bahwa kriteria anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan.
- e. Menurut Konvensi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 1 Tanggal 20 November 1989, sebagaimana dikutip Darwin Prinst, Anak adalah setiap orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Darwin Prinst, 1997: 104-105).
- f. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 98, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman menegaskan bahwa, anak adalah orang yang belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri (Abdurrahman, 1992: 137).
- g. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, orang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum 21 tahun.

2. Pengertian Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil

a. Pengertian anak nakal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak Nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2).

Menurut B. Simanjuntak yang dikutip oleh Sudarsono, memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Suatu perbuatan disebut *deliquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau perbuatan yang anti-sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif (Sudarsono, 2004: 10).

- b. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 huruf a).
- c. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 huruf b).

- d. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 huruf c).

3. Batasan Usia Anak Nakal

Setelah mengamati batasan-batasan pengertian anak dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa hukum positif Indonesia tidak ada keseragaman pengaturan mengenai batasan usia anak. Namun demikian karena kajian ini berfokus pada pembimbingan anak nakal oleh BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, maka batas usia anak yang dipakai dalam tulisan ini ialah batas usia sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus anak melainkan orang yang sudah dewasa.

B. Tinjauan Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Sekilas Tentang Sejarah Lahirnya BAPAS

Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03

Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Penjabaran mengenai peranan BAPAS dapat disimak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian di dalam tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Salah satu dari klien tersebut adalah klien anak, sehingga BAPAS berperan dalam pembimbingan anak nakal.

2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang BAPAS

Balai Pemasyarakatan atau BAPAS adalah unit pelaksana dalam bidang yang dipimpin oleh seorang kepala BAPAS. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien

Pemasyarakatan. BAPAS didirikan di setiap Ibu Kota Kabupaten atau Kotamadya, dan dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau Kota Administrasi dapat didirikan Cabang BAPAS. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai peraturan Perundang-undangan. Pada umumnya tugas BAPAS dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian lebih diperjelas dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 - 1) membantu tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal
 - 2) menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS
 - 3) menentukan program perawatan tahanan di Rutan
 - 4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan

- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Masyarakat).

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Masyarakat, Pembimbing Masyarakat berkewajiban :

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian masyarakat (LITMAS) yang telah dilakukannya
- b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Masyarakat guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada Hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukannya

- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan).

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai wewenang atau kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) maupun dalam pembimbingan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 34 ayat (1), disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
2. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 34 ayat (1)).

Dengan demikian, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempunyai wewenang untuk mengadakan penelitian kemasyarakatan, dimana hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara anak nakal. Pembimbing Kemasyarakatan bukan sebagai pembela, tetapi memberi laporan sewajarnya mengenai anak nakal. Kekhilafan-kekhilafan apa yang telah dilakukan oleh anak, apa sebab-

sebabnya, apa latar belakangnya, yang akan menjadi bahan bagi tuntutan Jaksa dan putusan pengadilan yang bukan merupakan balas dendam atau menghukum saja, tetapi dengan tujuan melindungi, mendidik kembali, membantu memperbaiki kehidupan selanjutnya (Shanty Dellyana, 1988: 106).

3. Klien Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS dan wajib didaftar, Pendaftaran klien BAPAS adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan, yang meliputi:
 - 1) putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri
 - 2) Jati diri
- b. Pembuatan pas foto
- c. Pengambilan sidik jari
- d. Pembuatan berita acara serah terima Klien (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 40).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda. (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 35).

4. Klasifikasi dan Bagan Organisasi BAPAS

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Balai Pemasyarakatan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelas yang didasarkan atas lokasi, beban kerja, dan wilayah kerja yaitu:

- a. Balai Pemasyarakatan Kelas I, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Bimbingan Klien Dewasa
 - 3) Seksi Bimbingan Klien Anak
- b. Balai Pemasyarakatan Kelas II, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Bimbingan Klien Dewasa
 - 3) Seksi Bimbingan Klien Anak

(<http://www.ditjenpas.go.id/pdf/kepmen/Kepmenkeh1987-OrtaBispa.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Balai BISPA (sekarang namanya menjadi BAPAS). Seksi

Bimbingan Klien Dewasa bertugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan dan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa. Seksi bimbingan klien anak bertugas melakukan registrasi, dan memberikan bimbingan dan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak. Seksi bimbingan klien anak terdiri dari:

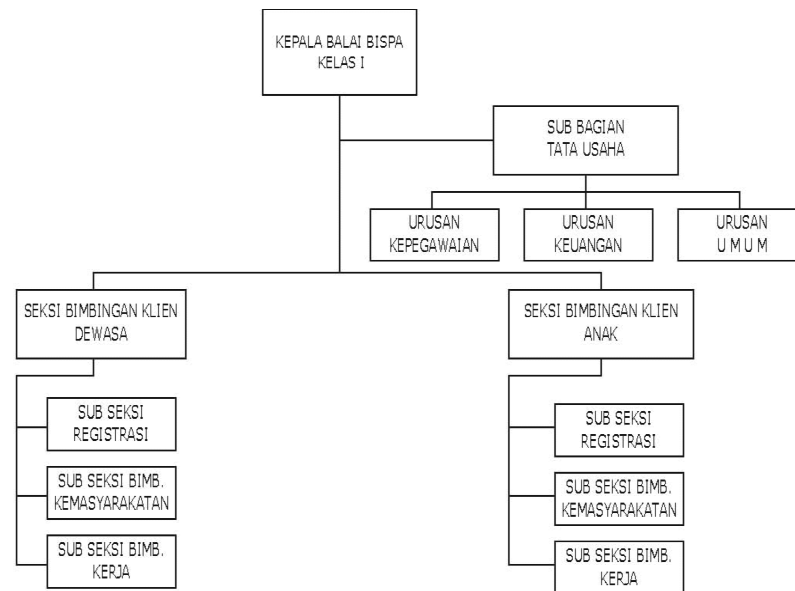
- a. Sub Seksi Registrasi
- b. Sub Seksi bimbingan Kemasyarakatan
- c. Sub Seksi Bimbingan Kerja

(<http://www.ditjenpas.go.id/pdf/kepmen/Kepmenkeh1987-OrtaBispa.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiliskopi atau pengambilan sidik jari, statistik, analisa, dan evaluasi. Sub Seksi Bimbingan Klien Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan, kunjungan rumah klien, mengikuti sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada LAPAS, pembinaan klien pidana bersyarat, anak yang diputus Hakim dikembalikan kepada orang tua walinya, Anak Asuh, Anak Pidana, dan Anak Negara yang lepas bersyarat, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat cuti menjelang lepas (<http://www.ditjenpas.go.id/pdf/kepmen/Kepmenkeh1987-OrtaBispa.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

Untuk lebih memperjelas mengenai susunan organisasi dan tata kerja BAPAS, berikut ini adalah bagan susunan organisasi dan tata kerja BAPAS Kelas 1 dan Kelas 11 yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Susunan organisasi BAPAS Kelas 1 dan Kelas 11 ini mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA. Namun demikian, penyebutan BAPAS dalam bagan di bawah ini masih menggunakan istilah Balai BISPA dikarenakan bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA ini merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA, yang pada waktu itu namanya masih menggunakan nama Balai BISPA.

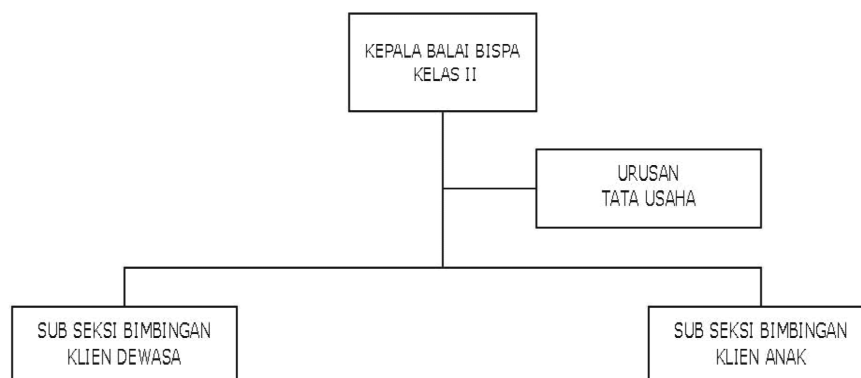
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BISPA KELAS I



Gambar 1. Susunan Organisasi BAPAS Kelas I

Sumber: (<http://www.ditjenpas.go.id/pdf/kepmen/kepmenkeh1987-OrtaBispa.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BISPA KELAS II



Gambar 2. Susunan Organisasi BAPAS Kelas II

Sumber: (<http://www.ditjenpas.go.id/pdf/kepmen/kepmenkeh1987-OrtaBispa.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

C. Tinjauan Tentang Pembimbingan Anak Nakal Oleh Balai

Pemasyarakatan (BAPAS)

Ketentuan mengenai Pembimbingan anak nakal, termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari klien dewasa dan klien anak. Dalam hal ini, klien yang akan dibimbing adalah klien anak. Pembimbingan anak nakal oleh BAPAS dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 32 ayat (1)).

Dalam melaksanakan pembimbingan, Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan. Kegiatan pembimbingan diarahkan pada kemampuan anak nakal untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). Program pembimbingan klien anak terdiri dari pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
8. Ketrampilan kerja
9. Latihan kerja dan produksi (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3).

Pembimbingan klien anak dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu : tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

1. Pembimbingan tahap awal meliputi:
 - a. Penerimaan dan pendaftaran Klien
 - b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan
 - c. Penyusunan program pembimbingan
 - d. Pelaksanaan program pembimbingan
 - e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 40 ayat (1)).
2. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:
 - a. Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembimbingan

- c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 40 ayat (2)).
3. Pembimbingan tahap akhir meliputi:
- a. Penyusunan program pembimbingan tahap akhir
 - b. Pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir
 - c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan
 - d. Penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan
 - e. Pengakhiran tatahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 40 ayat (3)).

Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan. Data sebagaimana dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.

Pembimbingan Klien anak berakhir apabila klien yang bersangkutan :

- 1. selesai menjalani masa pembimbingan;
- 2. dicabut statusnya sebagai Klien anak; atau
- 3. meninggal dunia (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 66)

Dalam hal berakhirnya pembimbingan klien anak yang selesai menjalani masa pembimbingan, kepada yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan. Demikian juga dalam hal berakhirnya pembimbingan klien anak yang dicabut statusnya sebagai klien anak, maka pihak BAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Departemen Sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 67)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta di Jalan Trikora No. 1 Yogyakarta. Telp: 374307 – 376324. Dipilihnya tempat tersebut dengan pertimbangan bahwa di Yogyakarta masih banyak terdapat kasus kenakalan anak, dan hanya ada satu Balai Pemasyarakatan di Yogyakarta yang bertugas dalam pembimbingan anak nakal.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2010.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan suatu data dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya (Soeharsimi Arikunto, 1991: 25). Sejalan dengan pendapat Hadari Nawawi, penelitian bersifat berdeskriptif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang dan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2001: 63).

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas masalah aktual dan pemecahannya dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, dan

mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan secara deskriptif atau apa adanya. Seperti halnya penelitian deskriptif, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta. Di dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang sebagai subjek penelitian (Lexy. J. Moleong, 2007: 4). Selain itu pendekatan kualitatif, digunakan untuk memahami suatu fenomena yang sama sekali belum diketahui atau baru sedikit diketahui (Basrowi dan Suwandi, 2008: 22). Melalui pendekatan ini peneliti ingin menggali mengenai Peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, maka penelitian ini menggunakan teknik sample bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pemilihan

subjek penelitian yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Lexy. J. Moleong, 2007: 224). Subjek penelitian sebagai informan, merupakan orang-orang yang karena posisinya sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih subjek penelitian di sini adalah:

1. Petugas Kemasyarakatan yang bertugas di BAPAS Kelas I Yogyakarta yang berpengalaman dalam menangani perkara anak nakal di Yogyakarta.
2. Petugas Kemasyarakatan yang bertugas di BAPAS Kelas I Yogyakarta yang berpengalaman dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria tersebut, sebagai subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seorang Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
2. Seorang Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
3. Seorang Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
4. Seorang Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
5. Dua orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai orang yang mengajukan atau memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 127). Tujuan diadakan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data, informasi, penjelasan dari Petugas Kemasyarakatan Klien Anak sebagai subjek penelitian mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Lexy. J. Moleong, 2004: 138). Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang memuat pokok permasalahan yaitu mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-

hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta. Wawancara tersebut dilaksanakan secara bebas tidak terpaku pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara hanya digunakan sebagai pengendali agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji peristiwa (Lexy. J. Moleong, 2007: 161). Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, 2008: 158). Dokumen dalam penelitian ini, antara lain dokumen mengenai struktur organisasi BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan, jumlah klien anak yang dibimbing, dokumen hasil penelitian kemasyarakatan klien anak, serta laporan hasil pembimbingan anak nakal di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta.

3. Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Suharsimi Arikunto, 2008: 131). Observasi di dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap peranan BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam pembimbingan anak nakal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien anak di Yogyakarta.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik *triangulasi* dan *cross cek* data. Menurut Sugiyono, teknik *triangulasi* berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi untuk sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2010: 330). Teknik *Triangulasi* dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mengecek data hasil wawancara antar subjek penelitian, data dari dokumentasi, dan juga data dari observasi mengenai peranan BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam pembimbingan anak nakal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien anak di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh

BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

Selain menggunakan teknik *triangulasi*, dalam penelitian ini juga menggunakan pemeriksaan keabsahan data dengan *cross check* data. *Cross check* data dilakukan jika dalam pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Burhan Bungin, 2001: 95-96). *Cross check* data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara dengan dokumentasi mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara dengan wawancara mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta membandingkan dan mengecek kembali dokumentasi dengan dokumentasi mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data (Lexy. J. Moleong, 2007: 280). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa kongkret, kemudian ditarik kesimpulan yang umum, yaitu dengan cara

menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang dihasilkan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu peneliti melakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dengan memilih data yang dapat menjawab permasalahan mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, selanjutnya data itu disederhanakan.

2. Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang disederhanakan dan dipilih tersebut kemudian disusun secara sistematis ke dalam unit-unit sesuai dengan sifat masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang pokok dan penting. Unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian tentang peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang

dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

3. Display Data

Display data adalah penyajian data ke dalam matriks yang sesuai. Display data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan yang sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

4. Pengambilan Kesimpulan

Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induksi yaitu yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan yang objektif sesuai fakta. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta

1. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1970 Nomor J.H. 4/6/5/13 yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Kabinet Nomor 75/U/KEP/12/1996, diputuskan mulai terhitung tanggal 1 April 1970 Kantor Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Yogyakarta mulai terbentuk, bersama dengan pembentukan kantor Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak lain yang terletak di Surabaya, Malang, Madiun, dan Jakarta.

Dalam hal pertanggungjawaban tugas, kantor Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Yogyakarta langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Kepala Inspeksi Wilayah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak III yang berkedudukan di Semarang. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Yogyakarta sebagaimana disebut di atas mulai berdiri pada tanggal 1 April 1970, tetapi baru diresmikan pada tanggal 7 Juli 1970. Karena belum memiliki gedung sendiri, maka untuk sementara kantor Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Yogyakarta masih menjadi satu dengan Lembaga Pemasyarakatan Jl. Taman Siswa 44 Yogyakarta. Pada tahun 1975 Balai

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. Solo Km. 9-10 No. 209 Yogyakarta terhitung mulai 3 Maret 1975.

Selanjutnya berdasar dari perkembangan luas daerah hukumnya, sekitar tahun 1977 dibuka lagi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak III di Wates dan Wonosari dengan alasan karena volume pekerjaan dan letak daerah sangat jauh dari jangkauan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Yogyakarta. Sekitar tahun 1987 sewaktu Menteri Kehakiman Republik Indonesia dijabat oleh Ismail Saleh, terjadi perampingan atau pengefisien pekerjaan dan lebih menitik beratkan pengembangan di luar Pulau Jawa, maka pada tahun 1987 Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Wonosari dan Wates direkrut menjadi satu di Yogyakarta.

Dengan pertimbangan badan kerja yang ada dan letak kantor yang kurang strategis, dimana Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kelas I mestinya berada di Propinsi, kemudian Balai BISPA Kelas I Yogyakarta menempati gedung milik Kraton Yogyakarta di jalan Trikora No.1 Yogyakarta dengan cara mengajukan permohonan kepada Kraton Yogyakarta. Hal inipun mendapat persetujuan dari Dirjen Pemasyarakatan dengan Nota Persetujuan Nomor: A.4.PL.02.01-125 tanggal 25 September 1994 dan Nota Persetujuan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Pemberitahuan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DIY tanggal 5 Oktober 1994.

Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak mulai mempunyai pegangan yang mantap sebagai dasar operasionalnya walaupun untuk pelaksanaan lebih lanjut masih menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-Undang yang bersangkutan. Sebagai realisasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai bunyi ketentuan pasal 1 angka 4, maka Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak berubah menjadi ***Balai Pemasyarakatan (BAPAS)***. Perubahan nama sebagaimana tersebut di atas menjadi Balai Pemasyarakatan telah diresmikan pada tanggal 16 Mei 1997, sehingga pada hari tersebut sudah tidak lagi memakai nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak kelas I Yogyakarta, akan tetapi secara resmi digunakan nama *Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta atau sering disingkat BAPAS Kelas I Yogyakarta*.

2. Lokasi dan Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta

Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta berlokasi di Jalan Trikora No.1 Yogyakarta 55121 Telp. 0274-374307 dengan status hak milik tanah atas nama Kraton Yogyakarta. Batas lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta antara lain:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan TELKOM
- b. Sebelah timur berbatasan dengan TK/ SD Pangudi Luhur

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Alun-Alun Lor Kraton Yogyakarta.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Trikor

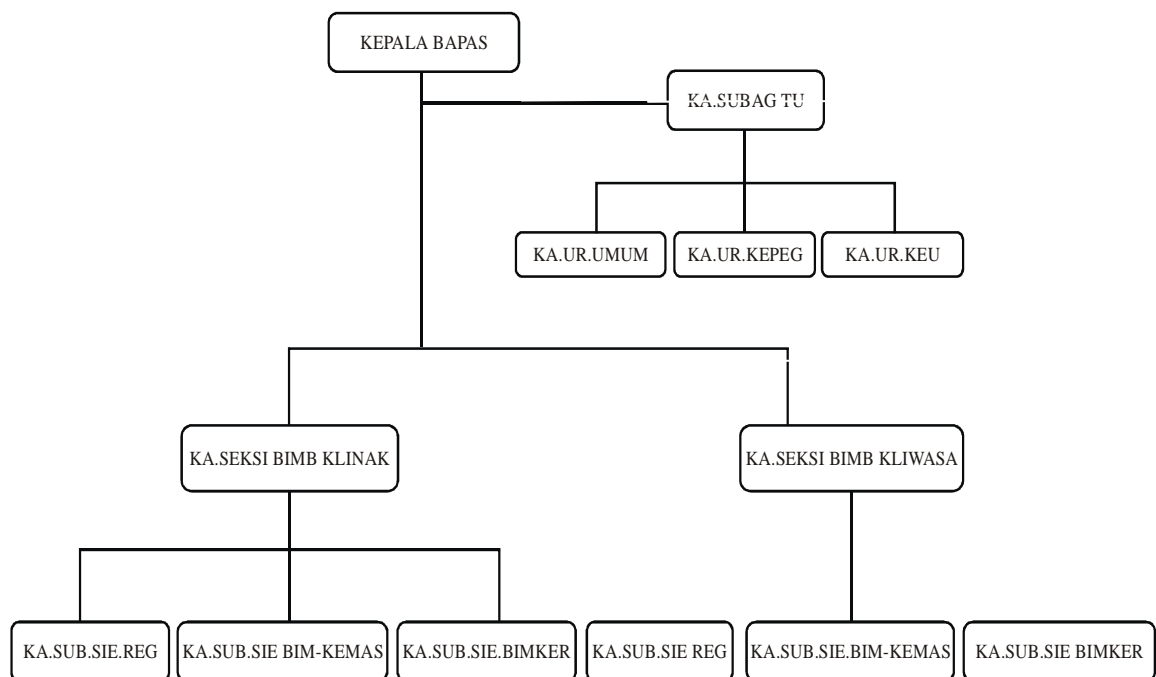
Sebelumnya wilayah kerja BAPAS Kelas I Yogyakarta meliputi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kodya Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sejak berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari pada tahun 2003 maka wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, mempunyai wilayah kerja antara lain:

- a. Kodya Yogyakarta
- b. Sleman
- c. Kulon Progo

3. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta

Untuk memperjelas mengenai struktur organisasi BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, berikut ini adalah bagan mengenai struktur organisasi BAPAS Kelas I Yogyakarta, yang telah diolah oleh peneliti.

Bagan struktur organisasi BAPAS Kelas 1 Yogyakarta



Gambar 3. Bagan struktur organisasi BAPAS Kelas 1 Yogyakarta

Sumber : Dokumentasi Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta Tahun 2010, yang telah diolah oleh peneliti.

Keterangan:

KA. SUBAG TU	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
KA. UR. UMUM	: Kepala Urusan Umum
KA. UR. KEPEG	: Kepala Urusan Kepegawaian
KA. UR. KEU	: Kepala Urusan Keuangan
KA. SEKSI BIMB KLINAK	: Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak
KA. SEKSI BIMB KLIWASA	: Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa
KA. SUB. SIE. REG	: Kepala Sub Seksi Registrasi

KA.SUB.SIE BIMB-KEMAS	: Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
KA. SUB. SIE BIMKER	: Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja
KA.SUB.SIE.REGISTRASI	: Kepala Sub Seksi Registrasi
KA.SUB.SIE.BIM-KEMAS	: Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
KA.SUB.SIE.BIMB.KERJA	: Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala BAPAS. Susunan organisasi BAPAS Kelas I Yogyakarta terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Bimbingan Klien Anak
- c. Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pasal 5).

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga BAPAS. Sub Bagian Tata Usaha masih dibagi lagi menjadi tiga bagian urusan yaitu urusan umum, urusan khusus, dan urusan kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan umum, kepala urusan kepegawaian, dan kepala urusan keuangan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pasal 8).

Seksi bimbingan klien anak bertugas melakukan registrasi, dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak. Seksi bimbingan klien anak terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
- c. Sub Seksi Bimbingan Kerja (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pasal 16).

Selanjutnya Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiliskopi atau pengambilan sidik jari, statistik, analisa, dan evaluasi. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), kunjungan rumah klien anak, mengikuti sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada LAPAS, pembinaan klien pidana bersyarat, anak yang diputus Hakim dikembalikan kepada orang tua walinya, Anak Asuh, Anak Pidana, dan Anak Negara yang lepas bersyarat, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat cuti menjelang lepas. Kemudian Sub Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas narapidana anak, anak Negara, dan klien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan (Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pasal 17).

Demikian halnya untuk Seksi Bimbingan Klien Dewasa bertugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan dan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa. Seksi Bimbingan Klien Dewasa terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi
- b. Sub Seksi bimbingan Kemasyarakatan
- c. Sub Seksi Bimbingan Kerja (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pasal 12).

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiliskopi atau pengambilan sidik jari, statistik, analisa, dan evaluasi. Sub Seksi Bimbingan Klien Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan, kunjungan rumah klien, mengikuti sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada LAPAS, memanggil klien dalam rangka pembinaan perorangan dan kelompok, pembinaan klien pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan cuti menjelang lepas. Sub seksi bimbingan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas narapidana dan klien yang memerlukan

(Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pasal 13).

Adapun mengenai jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta , dapat dilihat pada Tabel I berikut:

Tabel 1. Jumlah Personil Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Yogyakarta

Keterangan	Tingkat Pendidikan Pembimbing Kemasyarakatan			Jumlah
	SMU	Diploma	Strata I	
Seksi Bimbingan Klien Anak	2	1	9	12
Seksi Bimbingan Klien Dewasa	2	1	12	15

Sumber: Dokumentasi BAPAS Kelas I Yogyakarta Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas, BAPAS Kelas I Yogyakarta mempunyai 12 (dua belas) orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang terdiri dari: 2 (dua) orang lulusan SMU, 1 (satu) orang lulusan Akademi, dan 9 (sembilan) orang lulusan Strata I. Sedangkan untuk Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa, BAPAS Kelas I Yogyakarta mempunyai 15 (lima belas) orang pembimbing, yang terdiri dari: 2 (dua) orang lulusan SMU, 1 (satu) orang lulusan Akademi, dan 12 (dua belas) orang lulusan Strata I. Terkait mengenai jabatan dalam membimbing klien dewasa maupun klien anak, tidak ada persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membimbing klien dewasa maupun klien anak, sedangkan yang

membedakan hanya mengenai klien yang ditangani. Untuk klien anak yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak adalah anak yang berusia 8 (delapan) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan untuk klien dewasa yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa adalah klien yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu tahun).

B. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta

Dewasa ini penyebutan “anak nakal” sering disebut dengan “anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)”. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang meliputi:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan anak nakal. Pembimbingan anak nakal di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dilakukan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak. Terkait dengan masa pembimbingan anak nakal, ketentuan mengenai berapa lama pembimbingan anak nakal tersebut sudah ditentukan berdasarkan keputusan Pengadilan. Masing-masing anak berbeda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar pembimbingan anak nakal antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Landasan hukum pembimbingan anak nakal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.
- 2) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan. Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS wajib didaftar.
- 3) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi;

- a) pencatatan;
 - (1) putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 - (2) Jati diri;
- b) pembuatan pas foto;
- c) pengambilan sidik jari; dan
- d) pembuatan berita acara serah terima Klien.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Landasan hukum Pembimbingan anak nakal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak antara lain:

- 1) Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- 2) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
 - b) Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang menjelaskan bahwa dalam hal perkara anak nakal, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak .

4) Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang menjelaskan bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak nakal yang bersangkutan, dimana Laporan tersebut berisi:

- a) Data individu anak nakal, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak nakal
- b) Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Landasan hukum pembimbingan anak nakal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, termuat dalam salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak huruf d yaitu:

“bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”

d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk

meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

- 2) Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, yang menjelaskan Pembimbingan klien anak dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dan menitik beratkan pada reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- 3) Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang menjelaskan bahwa pembimbingan klien anak dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan yakni pembimbingan tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir, dimana penyelenggaraan pembimbingan tersebut ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak. Data dari klien anak tersebut merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan klien anak yang dimaksud.
- 4) Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang menjelaskan mengenai klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:
 - a) Terpidana Bersyarat;
 - b) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

- c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
 - f) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
 - g) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- a) Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjelaskan mengenai pembimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
 - b) Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan mengenai pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas terhadap Narapidana, Anak Negara, Anak Pidana dilaksanakan oleh petugas BAPAS.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 6 yang menjelaskan mengenai hubungan kerjasama pembimbingan klien anak dilaksanakan berdasarkan program

pembimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas klien anak, dimana program pembimbingan tersebut meliputi:

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku
- e) Kesehatan jasmani dan rohani
- f) Kesadaran hukum
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h) Ketrampilan kerja
- i) Latihan kerja dan produksi

Pelaksanaan pembimbingan anak nakal yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak biasanya diawali dengan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan/LITMAS (dalam hal ini LITMAS bimbingan). Namun demikian tidak semua klien anak dilakukan LITMAS bimbingan, karena LITMAS bimbingan hanya dilakukan terhadap klien anak yang masa pembimbingannya lebih dari 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk klien anak yang masa pembimbingannya kurang dari 3 (tiga) bulan maka data diri klien anak, keluarga klien anak, maupun data pendidikan klien anak memakai data dari LITMAS sidang sebelum anak tersebut disidang di Pengadilan. Proses pembimbingan anak nakal yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan berdasarkan kepada kebutuhan dan permasalahan klien anak, 3 (tiga) tahap pembimbingan tersebut meliputi:

a. Pembimbingan tahap awal

Pada tahap awal ini, petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak melakukan tindakan yang dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi penerapan sistem pembimbingan yang akan dipergunakan di dalam memberikan program pembimbingan terhadap anak nakal. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak bekerjasama dengan keluarga klien anak guna mengetahui identitas klien anak, identitas kedua orang tua klien anak, susunan keluarga klien anak, keadaan ekonomi orang tua klien anak, kehidupan beragama klien anak maupun keluarganya, pendidikan formal maupun informal yang telah dilalui maupun yang sedang dijalani oleh klien anak, serta jenis tindak pidana dan kronologi kejadian tindak pidana yang pernah dilakukan oleh klien anak tersebut.

Selain bekerjasama dengan keluarga klien, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum (polisi yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan) guna mengetahui laporan perkembangan klien anak sewaktu klien anak tersebut berada di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga bekerjasama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa) serta masyarakat di sekitar tempat tinggal klien anak guna mengetahui tanggapan terhadap kenakalan yang pernah dilakukan oleh klien anak tersebut. Dengan demikian Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dapat menentukan sebab-sebab anak nakal melakukan kenakalannya. Misalnya kenakalan yang disebabkan karena keadaan ekonomi orang tua klien anak yang tergolong kurang mampu,

pengaruh keadaan lingkungan masyarakat yang kurang baik, dan lain sebagainya.

Contoh dari pembimbingan klien anak yang pernah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak pada tahap awal ini yakni mengunjungi rumah klien anak yang berinisial DS yang beralamat di Pakualaman Yogyakarta. Dalam melakukan kunjungannya ke rumah DS, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak menanyakan serentetan pertanyaan mengenai identitas DS, identitas kedua orang tua DS, susunan keluarga DS, keadaan ekonomi orang tua DS, kehidupan beragama DS maupun keluarganya, pendidikan formal maupun informal yang telah dilalui DS maupun yang sedang dijalani oleh DS, serta jenis tindak pidana yang pernah dilakukan DS dan bagaimana kronologi kejadian tindak pidana tersebut. Pembimbingan terhadap DS dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak setelah DS keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. DS merupakan salah satu pelaku tindak pidana penyalahgunaan NARKOBA yang dahulu dibina di LAPAS NARKOTIKA Kelas II A Yogyakarta.

Selain mengunjungi rumah DS, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga berkunjung ke LAPAS Kelas II A Yogyakarta guna mengetahui laporan perkembangan serta perilaku DS sewaktu dulu DS berada di dalam pembinaan LAPAS Kelas II A Yogyakarta. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga melakukan kunjungan ke pemerintah Desa (Kepala Desa) dan masyarakat di sekitar tempat tinggal

DS guna mengetahui tanggapan dari Kepala Desa dan masyarakat setempat mengenai kenakalan yang pernah dilakukan oleh DS.

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak menyusun dan menentukan rencana program pembimbingan yang cocok untuk diterapkan kepada DS. Setelah rencana program pembimbingan tersusun, maka dimulailah program pembimbingan dengan cara memanggil DS untuk datang ke BAPAS Kelas I Yogyakarta atau Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang berkunjung ke rumah DS. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan DS maupun efektivitas penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta.

Pembimbingan dalam tahap awal ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dengan mengadakan pendekatan kepada DS (lebih bersifat sebagai pendekatan pribadi) dengan maksud agar DS mempunyai tempat mengadu segala kesulitan maupun beban yang dihadapinya. Dengan pendekatan pribadi ini diharapkan agar DS dapat menyadari akan segala kesalahan yang telah diperbuatnya, dapat menuntun DS untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta dapat menghantar dan mengarahkan DS kembali kepada lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat.

Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak harus berperan sebagai guru, sebagai orang tua, dan sekaligus sebagai teman, sehingga terjadi suatu hubungan yang harmonis antara Pembimbing

Kemasyarakatan Klien Anak dengan anak yang dibimbing. Apabila Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak sudah menganggap tahap awal ini cukup, maka diadakanlah suatu sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP) yang terdiri dari para Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dan dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak untuk diadakan penilaian mengenai pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahap awal dan menyusun rencana program pembimbingan untuk tahap kedua atau tahap lanjutan.

b. Pembimbingan tahap kedua atau lanjutan

Pada tahap lanjutan ini klien anak diberikan pembimbingan secara berkala dan rutin sesuai dengan kebutuhan dan keperluan anak yang dibimbing dengan disertai pertimbangan masalah dana dan sarana yang ada. Pembimbingan di sini lebih banyak bersifat membangun mental kepribadian yang kokoh (misalnya membangun mental kepribadian DS agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif seperti ajakan teman untuk minum minuman keras, mencuri, mencoba narkoba dan sebagainya serta lebih meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga berusaha menanamkan suatu sifat mandiri dalam diri klien anak. Misalnya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan nasehat agar DS berusaha menjadi anak yang lebih mandiri dalam keluarga, yang diawali dengan membiasakan mengerjakan pekerjaan untuk dirinya sendiri seperti mencuci pakaian sendiri, membantu pekerjaan rumah orang tua dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk pembimbingan yang lebih bersifat sebagai suatu pembimbingan fisik, seperti pendidikan ketrampilan kerja juga diberikan, namun hal itu tergantung dari minat klien anak yang dibimbing itu sendiri.

Dengan demikian peranan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak adalah memotivasi dan mendorong agar klien anak mau berusaha ke arah yang lebih baik sehingga anak tersebut dapat mengembangkan dirinya dan menjadi sosok individu yang mandiri. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga memberikan nasehat akan pentingnya bersekolah karena ilmu pengetahuan harus dimiliki oleh seorang anak sebagai generasi penerus bangsa. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga menjelaskan akan pentingnya mengikuti kegiatan kepramukaan atau organisasi lainnya seperti Karang Taruna, serta perlunya memiliki keterampilan kerja sehingga ia dapat menjadi tenaga muda yang siap menghadapi dunia kerja. Apabila tahap ini dirasa sudah cukup, maka diadakanlah sidang DPP untuk mengadakan penilaian mengenai pelaksanaan pembimbingan pada tahap lanjutan ini serta menyusun rencana program pembimbingan untuk tahap akhir.

Contoh dari pembimbingan tahap lanjutan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak menanyakan bagaimana perkembangan sekolah DS. Apakah DS mempunyai permasalahan dalam melanjutkan sekolahnya ataukah tidak. Pada saat melakukan kenakalannya DS baru menduduki bangku kelas 2 (dua) SMA, bahkan saat itu ia sedang menghadapi ujian akhir semester. Pada waktu pembimbingan tahap

lanjutan ini sesuai pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak memberikan nasehat dan memotivasi agar DS tetap melanjutkan sekolahnya, karena pada saat itu bersamaan dengan pendaftaran peserta didik baru. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga memberikan nasehat kepada DS untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga memberikan nasehat agar DS menjadi anak yang lebih mandiri.

Terkait dengan keadaan orang tua (ibu DS) yang baru saja masuk rumah sakit karena menderita penyakit asma dan selalu memikirkan DS, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga tidak lupa untuk memberikan motivasi kepada ibu DS agar ibu DS tetap bersabar dalam menghadapi cobaan yang dilaluinya dan mendoakan agar ibu DS lekas sembuh dari sakitnya. Ibu DS sempat masuk rumah sakit selama 3 (tiga) kali, terlebih saat mendengar kabar sewaktu dulu DS dipenjara, DS pernah dibenturkan kepalanya ke tembok oleh seorang oknum polisi sampai kepalanya terluka. Pada waktu itu DS melakukan salah satu kelalaian yakni lupa menutup kran air sewaktu wudhu. Ibu DS kaget mendengar berita mengenai DS tersebut sehingga ibu DS kembali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit.

c. Pembimbingan tahap akhir

Berdasarkan apa yang telah berhasil dicapai pada pembimbingan tahap awal dan tahap lanjutan serta didasarkan pada rencana pembimbingan tahap akhir yang telah disusun oleh rapat DPP, maka

dalam pembimbingan tahap akhir ini diadakanlah pelaksanaan pembimbingan klien anak dengan usaha untuk menuntaskan segala persoalan yang dihadapi oleh klien anak. Dengan keadaan ini diharapkan anak dapat megakhiri masa pembimbingannya dengan sukses sesuai dengan tujuan pembimbingan itu sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak selalu berusaha untuk mengetahui setiap persoalan yang dihadapi oleh klien anak dan berusaha untuk dapat ikut serta menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Pada pembimbingan tahap akhir ini, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan agar klien anak beserta keluarga lebih meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pembimbingan pada tahap akhir ini selesai, maka DPP mengadakan sidang untuk mengevaluasi keseluruhan dari hasil pembimbingan tersebut. Di samping itu jika dianggap perlu, dibicarakan juga mengenai kemungkinan diadakannya pembimbingan tambahan bagi anak tersebut.

Contoh dari pembimbingan tahap akhir ini yaitu Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak menanyakan kembali sejauh ini adakah permasalahan lain yang dihadapi oleh DS dan keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga mencari informasi mengenai perkembangan perilaku DS. Selama DS berada dalam pembimbingan BAPAS, apakah sudah ada perkembangan perilaku yang lebih baik dari diri DS pribadi atautkah belum. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak

tidak lupa untuk selalu mengingatkan agar DS dan keluarga lebih meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

C. Hambatan-Hambatan yang Ditemui Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam pembimbingan anak nakal yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari BAPAS Kelas I Yogyakarta, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar BAPAS Kelas I Yogyakarta. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam pembimbingan anak nakal antara lain:

1. Faktor intern atau faktor yang berasal dari BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, terdiri dari:
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan pokok dalam proses pembimbingan anak nakal, sehingga tanpa adanya sarana dan prasarana tentu akan menghambat keberhasilan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam melaksanakan proses pembimbingan anak nakal. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPAS Kelas 1 Yogyakarta jumlahnya masih sangat terbatas. Sejauh ini di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta belum ada fasilitas sepeda motor dari kantor bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang bertugas di lapangan. Hal demikian tentu saja menjadi salah satu hambatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Klien Anak yang kebetulan tidak membawa atau tidak mempunyai sepeda motor pribadi. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak harus menyesuaikan kapan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak tersebut bisa berkunjung ke rumah klien anak yang dibimbing.

Kemudian juga terkait dengan sarana komputer yang ada di ruang Sub Seksi Registrasi Klien Anak, hanya ada 1 (satu) buah komputer. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak terlebih bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang tidak memiliki laptop pribadi. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak mempergunakan komputer untuk menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan maupun laporan hasil pembimbingan klien anak secara bergantian.

Demikian juga mengenai sarana ruangan yang dipergunakan untuk pembimbingan klien anak, BAPAS Kelas 1 Yogyakarta belum mempunyai ruangan khusus untuk pembimbingan klien anak. Ruang pembimbingan masih menggunakan ruang aula yang biasa dipergunakan untuk rapat oleh pegawai BAPAS Kelas 1 Yogyakarta. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam proses pembimbingan, karena apabila ruang aula sedang dipergunakan untuk rapat, maka pembimbingan klien anak harus mencari ruangan lain yang bisa dipergunakan untuk pembimbingan.

b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Dalam pembimbingan anak nakal memerlukan penanganan atau cara- cara yang tidak mudah sehingga diperlukan suatu keahlian khusus,

dimana tidak semua orang dapat melakukannya. Misalnya Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak harus dari lulusan psikologi dimana mereka mengetahui cara-cara pendekatan dan pembimbingan yang tepat untuk anak nakal. Sumber daya manusia yang ada di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta masih sangat terbatas, sehingga perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Adapun Jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta

NO.	Nama Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak	Tingkat Pendidikan & Bidang Jurusan
1.	Dalwadji, S.H.	Strata 1, bidang Hukum
2.	Tri Handoko, S.Sos	Strata 1, bidang Sosiatri
3.	Pedro Sowares, S.H.	Strata 1, bidang Hukum
4.	Suhardono	SMU
5.	Drs. Farid Edi Susanto	Strata1, bidang Pendidikan
6.	Samsinah, Spd	Strata 1, bidang Pendidikan
7.	Rusmiati, S.Psi	Strata 1, bidang Psikologi
8.	Endang Wahyuningsih	SMU
9.	Sri Akadiyanti, Spd	Strata 1, bidang Pendidikan
10.	Dini Ramaina, Amd IP, S.H.	Strata 1, bidang Ilmu Pemasyarakatan dan Hukum
11.	Anik Pujiastuti, S.H.	Strata 1, bidang Hukum
12.	Anisa Teguh Saputri, Amd IP	Diploma, bidang Ilmu Pemasyarakatan

Sumber: Dokumentasi BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta jumlahnya ada 12 (dua belas orang), yakni 2 (dua) orang lulusan SMU, 1 (satu) orang lulusan diploma, 1 (satu) orang lulusan S1 bidang psikologi, 1 (satu) orang lulusan S1 bidang sosiatri, 4 (empat) orang lulusan S1 bidang hukum, dan 3 (tiga) orang lulusan S1 bidang pendidikan. Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang tingkat pendidikannya berasal dari bidang/jurusan psikologi hanya ada satu orang yaitu ibu Rusmiati, S.Psi sehingga sumber daya manusia yang ada dari Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

c. Terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja BAPAS Kelas I Yogyakarta.

Wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Yogyakarta meliputi Kodya Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Yogyakarta menjadi salah satu hambatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak karena pembimbingan untuk wilayah yang jauh dari kantor BAPAS tentunya memakan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh pembimbingan terhadap klien anak yang berinisial DN yang tempat tinggalnya berada di daerah pegunungan di Kulon Progo. Tempat tinggal DN selain jauh dari kantor BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, juga mengenai area jalan yang dilalui menuju ke rumah DN agak sedikit sulit dilalui karena di daerah pegunungan. Sebaiknya untuk

wilayah Kulon Progo didirikan kantor BAPAS sendiri sehingga jangkauan wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Yogyakarta tidak terlampau luas.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, terdiri dari:

a. Kondisi Klien Anak

Kondisi klien anak merupakan salah satu hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan klien anak. Seperti halnya klien anak yang beralamat di Kulon Progo yang tidak memiliki sarana telp atau hand phone sebagai alat komunikasi sehingga Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak tidak bisa berkomunikasi dengan anak tersebut akibatnya Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak agak kesulitan dalam mengatur jadwal kunjungan.

Dengan kondisi klien anak yang demikian, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berkunjung ke rumah klien tanpa berkomunikasi dengan anak tersebut. Dalam kenyataan di lapangan atau dalam praktek yang pernah ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, klien anak tersebut tidak sedang berada di rumahnya, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak harus menunggu sampai anak tersebut pulang atau Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berkunjung lagi di keesokan harinya. Contoh di atas tentu menjadi salah satu hambatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang masih mempunyai tugas lain.

b. Keadaan Ekonomi orang tua klien anak

Keadaan ekonomi dari orang tua klien anak juga merupakan salah satu hambatan dalam proses pembimbingan anak nakal. Misalnya pada saat klien anak harus berkunjung ke BAPAS Kelas 1 Yogyakarta untuk melaksanakan pembimbingan tentunya klien anak tersebut memerlukan transportasi, terlebih-lebih bagi klien anak yang tidak mempunyai sepeda motor maka ia harus naik bus. Terkadang orang tua tidak mempunyai uang untuk membiayai transportasi anaknya yang harus melaksanakan pembimbingan. Dengan demikian untuk frekuensi pembimbingan yang seharusnya seminggu sekali menjadi dua minggu sekali sehingga proses pembimbingan menjadi kurang efektif.

c. Keadaan masyarakat di sekitar klien anak

Keadaan masyarakat di sekitar klien anak juga merupakan salah satu hambatan yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak. Dalam kenyataan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak masih menemukan masyarakat yang kurang memahami akan tugas dari BAPAS. Masyarakat terkesan takut ketika dimintai keterangan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak sehingga petugas Kemasyarakatan Klien Anak harus menemui orang lain yang bersedia dimintai keterangan guna melengkapi data klien anak dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Kondisi masyarakat yang demikian tentunya menjadi salah satu hambatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam hal pengefisiensian waktu.

D. Upaya yang Dilakukan Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta

Upaya yang dilakukan oleh BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal dibedakan menjadi dua yakni upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor intern dan upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor ekstern.

1. Upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor intern, antara lain:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang tidak tentu setiap harinya membawa sepeda motor, apabila ada kunjungan ke rumah klien anak, maka jadwal kunjungan menyesuaikan ketika Pembimbing Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak bisa berkunjung ke rumah klien anak yang dibimbing. Dengan demikian proses pembimbingan anak nakal tetap dapat terlaksana. Misalnya bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang tidak mempunyai sepeda motor sendiri dan beliau harus menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan suaminya, maka jadwal pembimbingan menyesuaikan ketika Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak bisa berkunjung ke rumah klien anak.

Terkait mengenai ruangan yang digunakan untuk ruang pembimbingan klien anak, apabila ruang aula sedang dipakai untuk rapat

oleh pegawai BAPAS, maka ruang pembimbingan mencari ruang lain yang bisa dipergunakan untuk pembimbingan. Kemudian juga mengenai sarana komputer yang ada di ruang Sub Seksi Registrasi Klien Anak yang jumlahnya hanya ada 1 (satu) buah, maka penggunaan komputer secara bergantian, sedangkan untuk pembimbingan untuk wilayah Kulon Progo tetap dilaksanakan sebagaimana adanya disesuaikan dengan keadaan misalnya pembimbingan klien anak yang seharusnya dilaksanakan kunjungan sebanyak 4 (empat) kali disingkat menjadi 3 (kali) tanpa mengurangi program pembimbingan yang diterapkan terhadap klien anak tersebut.

- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta.

Sehubungan dengan tingkat pendidikan personil Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dimana hanya ada satu orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dari lulusan psikologi, maka Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak mengikuti diklat-diklat yang terkait dengan pembimbingan anak nakal agar lebih mendalami permasalahan anak nakal dan pembimbingan yang tepat bagi anak nakal tersebut. Dengan mengikuti diklat-diklat tentang pembimbingan anak nakal, tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta.

2. Upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor ekstern, antara lain:

a. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Apabila kunjungan ke rumah klien anak untuk wilayah yang jauh dan klien anak tersebut tergolong dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu, dan tidak memiliki sarana komunikasi seperti telp maupun hand phone maka Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan dan melaksanakan pembinaan klien anak sampai dengan selesai. Misalnya Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak mensiasati dengan cara memperkirakan waktu kunjungan ke rumah klien anak di saat klien anak tersebut berada di rumah.

b. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat di sekitar tempat tinggal klien anak.

Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Pendekatan yang dilakukan misalnya dengan menjelaskan peranan BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam pembinaan anak nakal maupun dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian tentu akan mempermudah tugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam mencari informasi yang dibutuhkan terkait dengan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan maupun dalam pembinaan anak nakal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, pada bab ini peneliti ingin mengakhiri dengan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta. Adapun kesimpulan tersebut antara lain:

1. Pembimbingan terhadap anak nakal dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Wujud pembimbingan terhadap anak nakal disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien anak. Pada pembimbingan tahap awal, petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak melakukan tindakan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penerapan sistem pembimbingan yang akan dipergunakan di dalam memberikan program pembimbingan terhadap anak nakal. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak melakukan pendekatan (lebih bersifat sebagai pendekatan pribadi) kepada anak yang dibimbing tersebut untuk mengetahui segala permasalahan yang sedang dihadapinya sehingga ia mempunyai tempat mengadu segala kesulitan maupun beban yang dihipitnya. Dengan pendekatan pribadi tersebut diharapkan agar anak yang dibimbing dapat menyadari akan segala kesalahan yang telah diperbuatnya, dapat menuntunnya

untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta dapat menghantar dan mengarahkan agar anak nakal tersebut kembali kepada lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat sehingga ia bisa menjadi Warga Negara Indonesia yang baik, yakni Warga Negara yang hidup dengan berpedoman kepada agama dan Pancasila, sadar akan hak dan kewajibannya, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di mana ia tinggal.

Pada pembimbingan tahap kedua atau tahap lanjutan, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak memberikan bimbingan secara berkala dan rutin sesuai dengan kebutuhan dan keperluan anak yang dibimbing dengan disertai pertimbangan masalah dana dan prasarana yang ada. Pembimbingan tahap kedua lebih banyak bersifat membangun kepribadian yang kokoh dan menanamkan suatu sifat mandiri dalam diri anak nakal. Untuk pembimbingan yang lebih bersifat sebagai suatu pembimbingan fisik, seperti pendidikan ketrampilan kerja juga diberikan, namun hal itu tergantung dari minat anak yang dibimbing itu sendiri.

Pada pembimbingan tahap akhir ini, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga tidak lupa untuk selalu memberikan nasehat-nasehat kepada anak yang dibimbing tersebut sehingga ia dapat menjadi seorang Warga Negara Indonesia yang baik. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan agar anak yang dibimbing beserta keluarga lebih meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam pembimbingan anak nakal terdiri dari hambatan yang berasal dari faktor intern (faktor yang berasal dari BAPAS Kelas 1 Yogyakarta) dan faktor ekstern (faktor yang berasal dari luar BAPAS Kelas 1 Yogyakarta).

Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari faktor intern antara lain:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di BAPAS Kelas I Yogyakarta.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPAS Kelas 1 Yogyakarta jumlahnya masih sangat terbatas. Sejauh ini di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta belum ada fasilitas sepeda motor dari kantor bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang bertugas di lapangan, jumlah komputer yang terdapat di ruang Sub Seksi Registrasi Klien Anak hanya terdapat 1 (satu) buah komputer sehingga penggunaan komputer di ruang tersebut harus secara bergantian, dan BAPAS Kelas I Yogyakarta belum mempunyai ruangan khusus untuk pembimbingan klien anak. Ruang pembimbingan klien anak masih menggunakan ruang aula yang biasa digunakan untuk rapat oleh pegawai BAPAS Kelas 1 Yogyakarta.

- b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Dalam pembimbingan anak nakal, memerlukan penanganan atau cara-cara khusus, dimana tidak semua orang bisa melakukannya. Misalnya Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak harus lulusan psikologi dan di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta baru ada satu orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang dari lulusan psikologi.

- c. Terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja BAPAS Kelas I Yogyakarta.

Wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Yogyakarta meliputi Kodya Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Sebaiknya untuk wilayah Kulon Progo didirikan kantor BAPAS sendiri sehingga jangkauan wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Yogyakarta tidak terlampau luas.

Adapun hambatan-hambatan yang berasal faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar BAPAS Kelas 1 Yogyakarta antara lain:

- a. Kondisi Klien Anak

Kondisi klien anak yang tidak memiliki sarana telp atau hand phone sebagai alat komunikasi mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak tidak bisa berkomunikasi dengan anak tersebut sehingga agak kesulitan dalam mengatur jadwal kunjungan.

- b. Keadaan Ekonomi orang tua klien anak

Bagi orang tua klien anak yang tergolong kurang mampu, terkadang orang tua tidak mempunyai uang untuk membiayai transportasi anaknya yang harus melaksanakan bimbingan sehingga untuk frekuensi pembimbingan yang seharusnya seminggu sekali menjadi dua minggu sekali akibatnya proses pembimbingan menjadi kurang efektif.

- c. Keadaan masyarakat di sekitar klien anak

Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak masih menemukan masyarakat yang kurang memahami akan tugas dari BAPAS. Masyarakat terkesan takut saat dimintai keterangan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak sehingga Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak harus

menemui orang lain yang bersedia dimintai keterangan guna melengkapi data klien anak dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Upaya yang dilakukan oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal dibedakan menjadi dua macam yakni upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor intern dan upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor ekstern.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor intern antara lain:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak yang tidak tentu setiap harinya membawa sepeda motor, apabila ada kunjungan ke rumah klien anak, maka jadwal kunjungan menyesuaikan ketika Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak bisa berkunjung ke rumah klien anak yang dibimbing. Terkait mengenai ruangan yang digunakan untuk ruang pembimbingan klien anak, apabila ruang aula sedang dipakai untuk rapat oleh pegawai BAPAS, maka ruang pembimbingan mencari ruang lain yang bisa dipergunakan untuk pembimbingan. Kemudian juga mengenai sarana komputer yang ada di ruang Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak yang jumlahnya hanya ada 1 (satu) buah, maka penggunaan komputer secara bergantian, sedangkan untuk pembimbingan untuk wilayah Kulon Progo tetap dilaksanakan sebagaimana adanya disesuaikan dengan keadaan misalnya pembimbingan klien anak yang seharusnya

dilaksanakan kunjungan sebanyak 4 (empat) kali disingkat menjadi 3 (kali) tanpa mengurangi program pembimbingan yang diterapkan terhadap klien anak tersebut.

- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta.

Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak mengikuti diklat-diklat yang terkait dengan pembimbingan anak nakal agar lebih mendalami permasalahan anak nakal dan pembimbingan yang tepat bagi anak nakal tersebut. Dengan mengikuti diklat-diklat tersebut tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor ekstern antara lain:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Apabila kunjungan ke rumah klien anak untuk wilayah yang jauh dan klien anak tersebut tergolong dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu, dan tidak memiliki sarana komunikasi seperti telp maupun hand phone maka Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan dan melaksanakan pimbimbingan klien anak sampai dengan selesai. Misalnya Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak mensiasati dengan cara memperkirakan waktu kunjungan ke rumah klien anak di saat klien anak tersebut berada di rumah.

- b. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat di sekitar tempat tinggal klien anak.

Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak berusaha melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menjelaskan peranan BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam pembimbingan anak nakal maupun dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian tentu akan mempermudah tugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dalam mencari informasi yang dibutuhkan terkait dengan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan anak nakal.

B. Saran

1. Bagi pemerintah

Hendaknya pemerintah mendirikan BAPAS untuk wilayah kabupaten Kulon Progo, sehingga jangkauan wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Yogyakarta tidak terlampau luas.

2. Bagi BAPAS Kelas 1 Yogyakarta

- a. Perlu adanya penyediaan fasilitas pembimbingan klien anak yang lebih memadai dengan mengajukan usulan permohonan atau proposal kepada Kepala BAPAS Kelas 1 Yogyakarta guna menambah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pembimbingan anak nakal.
- b. Perlu adanya penyuluhan dari pihak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai peranan dan tugas dari

BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan anak nakal.

- c. Hendaknya BAPAS Kelas 1 Yogyakarta menyediakan ruangan khusus untuk pembimbingan anak nakal dan terpisah dengan ruangan klien dewasa.

3. Bagi Masyarakat

- a. Perlu adanya perhatian dan kerjasama dari masyarakat untuk membantu BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan anak nakal.
- b. Mengetahui arti penting BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pelaksanaan pembimbingan anak nakal guna mewujudkan warga Negara Indonesia yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadari Nawawi. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Drawin Prist. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Lexy. J. Moleong. 2004. *Meodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- . (2007) Cetakan kedua puluh empat. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakatra. PT Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 1991. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan..

Keputusan Menteri Kehakiman No: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Pembimbing Kemasyarakatan.

INTERNET:

Cetak Biru Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan. <http://www.ditjenpas.go.id/images/stories/download/blue%20print.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010.

Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang. <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/p/index/assoc/HASNOIbf1fc3e20dg.dir/doc.pc>. Diakses pada 15 April 2010.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. <http://www.ditjenpas.go.id/pdf/kepmen/Kepmenkeh1987-OrtaBispa.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010.

Peran Bapas Dalam Peradilan Anak Perlu Ditingkatkan. (<http://kliping-bapas.blogspot.com/2009/05/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak.html>). Diakses pada tanggal 15 April 2010.

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. <http://www.ditjenpas.go.id/pdf/kepmen/Kepmenkeh1997-PerubahanOrtaBispa.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010.

KARYA ILMIAH YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN:

Nurjaman. 2003. *Peranan Polisi Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana di Yogyakarta.* Yogyakarta: UNY.

SURAT KABAR:

Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 2010

Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 2010

Kedaulatan Rakyat, 2 April 2010

Kedaulatan Rakyat, 5 April 2010

Kedaulatan Rakyat, 30 April 2010